

PERANAN KOORDINASI CAMAT DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LANGOWAN BARAT

FRANDY ALVANDO RANTUNG
MASTJE PANGKEY
SONNY ROMPAS

Abstract: success in establishing a town. What's in the coordination and supervision of the sector. it is, of course, interfere with the process of running programs that have been in the plan. Weak coordination system in the Sub-District Government apparatus into a problem and need to examine again. and from the observations of the author of one of the districts in the Regency of Minahasa Langowan Barat subdistrict, precisely Not optimally coordinated by the Government apparatus. The purpose of this research was to determine the role of the head of the coordination support the success of the Western development in district Langowan

Departing from the problem and research objectives, the type of research that is in use is a kind of qualitative research, with observation data retrieval techniques, interviews, library studies and documentation.

The results of discussion demonstrating that: head of coordination in the West, already Langowan goes well with good and is in compliance with duty as head of the subdistrict. The apparatus is still lacking resources this is apparent in the level of education is still at domination by the , it graduates have also affected the management of the existing administration in district of Western Langowan supporting facilities in the Office District is still pretty minimal. This can be seen from the lack of vehicle service, so the process of work particularly in the program directly into the field sufficiently slow also facilities such as computers, and the internet at the Office of the district that has not been adequate. Referring to the conclusion above then suggested the role of head of coordination is currently well underway for that require consistency in the conduct of all existing programs. Camat presumably always act firmly but could also consider and hear the right advice from the staff officers, so harmony and harmony in a joint task. In the study permit and presumably training program to the entire Government apparatus in district West langowan So that in carrying out all duties and job bias is more effective the addition of means of transport is very important in that the mobilization and employment particularly work directly into the countryside this is certainly requires an adequate means of transport to be biased work goes well, the addition of computer and ancillary administration tool is also a very important thing, considering so much of his Government duties that require computer and technology tool tools supporting the other.

Keywords: *The Role Of The Head Of Coordination*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan

salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Agar proses pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pada aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan yang ada disuatu daerah guna menggalakkan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Koordinasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, dan kekosongan dalam kegiatan pembangunan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat atas, sehingga terdapat kerja sama yang terarah dan usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau pengorganisasian satu kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisiennya pembangunan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para

aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi.

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua belah pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32/2004, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agar lebih memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara umum telah diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4/1982 tentang Mekanisme Pengendalian Program Pembangunan Masuk Desa

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah (P5D).

Menurut Peraturan tersebut penyusunan Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada prinsipnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam koridor pembangunan Nasional.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan “perangkat wilayah” dalam kerangka asas desentralisasi, sekarang ini berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi. Dalam konteks di atas, sesuai dengan Undang-Undang yang ada hal tersebut merupakan tugas pokok, dan merupakan wewenang seorang kepala kecamatan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas

umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Selain itu, Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (PP.No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan). Amanat UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.19 Tahun 2008 tersebut menunjukkan bahwa Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-program dari instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan program dari instansi-

instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Salah satu program/kegiatan dari instansi lainnya yang harus di koordinasikan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat PP.19 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. (Gibson, 1998).

Namun tidak sedikit kendala untuk pencapaian keberhasilan dalam membangun sebuah kecamatan.terlebih dalam sektor koordinasi dan pengawasan.hal ini tentu saja mengganggu proses jalannya program-program yang telah di rencanakan.sistem koordinasi yang lemah dalam aparatur pemerintah kecamatan menjadi suatu masalah dan perlu di kaji kembali.dan dari pengamatan penulis salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Minahasa ,tepatnya kecamatan Langowan Barat Belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah.

Hal ini di karenakan belum di dukung oleh sarana dan prasarana yang representative,juga kurangnya sinkron antara pemerintah kecamatan dan masyarakat,terlebih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu dan menunjang pembangunan yang ada.kurang nya juga sosialisasi tentang program pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan factor yang menghambat percepatan pembangunan di kecamatan Langowan Barat.Kurangnya juga SDM untuk beberapa sub bagian dalam beberapa bidang sumberdaya pembangunan juga adalah salah satu kendala yang

perlu di benahi.karena Pembangunan memerlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mengurus hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang akan di laksanakan.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul”Peranan Koordinasi Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Langowan Barat”.

METODE PENELITIAN

3.1 .Jenis penelitian

Berangkat dari masalah dan tujuan penelitian,maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif.Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif.Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif,karena pada dasarnya penelitian kualitatif tidak berpola

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari 3 model yaitu,format deskriptif,format verifikasi,dan format *grounded research*.dalam penelitian ini menggunakan format deskriptif,yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok dan gejala yang terjadi.(koentjaraningrat,1993:89)

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Maleong(2007:6)adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian.misalnya

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

3.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka fokus penelitian adalah:

- 1.) Koordinasi Pembangunan
- 2.) Keberhasilan Pembangunan Kecamatan

Indikator-indikator pengukuran keberhasilan pembangunan kecamatan tersebut diukur dalam hal-hal seperti ini:

1. Dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi program pembangunan kecamatan tersebut
2. Terselenggaranya program/proyek pembangunan kecamatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Tercapainya sasaran setiap program terutama manfaatnya bagi pemerintahan

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah pegawai negeri sipil yang berada di kantor camat Langowan barat yang berjumlah 21 orang beserta 26 tenaga sukarela, kepala desa yang ada di wilayah kecamatan Langowan barat beserta masyarakat.

Dan yang menjadi objek penelitian adalah Camat Langowan barat. Pengambilan sampel harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

Seperti yang telah disebutkan bahwa penelitian informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian tentang Peran Camat Langowan barat, maka peneliti memutuskan untuk informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Kepala kecamatan Langowan barat. Dari informan kunci ini maka selanjutnya dapat diminta untuk memilih informan-informan berikutnya.

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan selama 2 bulan di kantor kecamatan dan wilayah kerja kecamatan Langowan barat, dengan pembagian waktu yang disesuaikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan

data suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya yang di jelaskan Sugiyono(2009:225). bahwa pengumpulan data dapat di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi menurut Kusuma(1987:25) adalah pengamatan yang di lakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktifitas terhadap individu atau subjek lain yang di selidiki, adapun jenis-jenis observasi yaitu observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih objek partisipan. Observasi partisipan adalah sebuah teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil pada kegiatan yang di lakukan oleh objek yang di selidiki. Observasi di lakukan dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan di kantor Camat dan wilayah lingkungan kerja Camat Langowan Barat.

Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang dapat di teliti dan juga mengetahui jabatan, tugas dan kegiatan, alamat nomor telepon dari calon informan sehingga dapat dengan mudah mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuisioner. Wawancara itu sendiri di bagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun di sini peneliti memilih menggunakan wawancara yang mendalam. Ini bertujuan mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyobasuki(2006:173)

Untuk menghindari kehilangan informasi maka peneliti meminta izin kepada informan untuk membawahi alat perekam. Sebelum di lakukan wawancara yang mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran latar belakang secara singkat dan jelas mengenai topik penelitian.

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara di antara lain sebagai berikut:

- a) Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki kata arti ganda, tagline atau bersifat ambiguitas
- b) Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya di pecah menjadi beberapa pertanyaan baru.
- c) Pewawancara hendaknya mengajukan pernyataan yang kongkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas

d) Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman dari responden.

e) Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternative yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternative

f) Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah, malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang bias di perhalus

3. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan mempelajari buku-buku refrensi, laporan-laporan, majalah-majalah jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Dokumentasi menurut Sugiyono(2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokument yang di gunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai Camat langowan barat maupun kantor camat beserta wilayah kerja kantor kecamatan. hasil penelitian dari observasi dan wawancara semakin sah dan dapat di percaya bila di dukung oleh foto-foto hasil dokumentasi

3.6 Sumber Data dalam Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang di lakukan oleh subjek yang dapat di percaya, yakni subjek penelitian atau informan

yang berkenaan dengan variabel yang di teliti atau data yang di peroleh dari teknik pengumpulan data yang di peroleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. dalam penelitian ini di peroleh dari observasi yang di lakukan oleh penulis serta hasil studi pustaka. dapat di katakan data sekunder ini bias berasal dari dokumen-dokumen grafis, seperti table, catatan, sms, dan lain-lain (Arikunto 2010:22)

3.7 Kredibilitas Penelitian

Pertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian melalui langkah- langkah sebagai berikut (Sugiono 2009:276)

a. Penelitian pengamatan

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah di peroleh maupun untuk mendapatkan data-data terbaru.

b. Peningkatan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan

c. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

d. Analisis kasus negative

Penelitian mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang di temukan sudah dapat di percaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang di maksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya data rekaman wawancara

f. Melakukan Member cek

Member cek adalah proses pengecekan data yang di peroleh oleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang di temukan di sepaakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel dan di percaya, tetapi apabila data yang di temuan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak di sepaakati oleh pemberi data, apabila perbedaanya tajam maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang di berikan oleh pemberi data.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan observasi maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa

- a. Peranan koordinasi camat di kecamatan Langowan barat, sudah berjalan dengan baik dengan baik dan sudah sesuai dengan tugas pokoknya sebagai kepala kecamatan.

- b. Sumberdaya aparatur yang masih kurang hal ini terlihat dalam tingkat pendidikan yang masih di dominasi oleh lulusan SLTA hal ini turut mempengaruhi kepengurusan administrasi yang ada di kecamatan Langowan Barat
- c. Fasilitas penunjang di kantor kecamatan masih cukup minim. Hal ini dapat di lihat dari kurangnya kenadaraan dinas, sehingga proses pekerjaan khususnya dalam program langsung ke lapangan cukup lambat juga fasilitas seperti computer, dan internet di kantor kecamatan yang blum memadai

6.1 Saran

- a. Peranan koordinasi camat saat ini berjalan dengan baik untuk itu di perlukan konsistensi dalam menjalankan seluruh program yang ada. Camat kiranya selalu bertindak tegas namun juga dapat mempertimbangkan dan mendengarkan saran dari staf pegawainya, sehingga terjadi keharmonisan dan keselarasan dalam tugas bersama.
- b. Di berikan kiranya izin belajar dan program pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintahan di kecamatan langowan barat. sehingga dalam menjalankan segala tugas dan pekerjaan bias lebih efektif

- c. Penambahan alat transportasi sangat lah penting dalam mobilisasi dan pekerjaan khususnya terjun langsung ke pedesaan hal ini tentunya memerlukan alat transportasi yang memadai agar kiranya pekerjaan bias berjalan dengan baik, penambahan computer dan alat penunjang administari juga adala hal yang sangat penting, mengingat begitu bnyak nya tugas pemerintah yang memerlukan alat alat computer dan teknologi penunjang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto.S. 2010.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* .Jakarta,Rineka Karya
- Gibson, dkk, 1989. *Organisasi* Edisi Kelima. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Kusuma, S.T. 1987. *Psiko Diagnostik*. Yogyakarta : SGPLB Negeri Yogyakarta.
- Koentjaraningrat,1993.*Metode-metode Penelitian Masyarakat*.Jakarta Gramedia Pustaka Utama
- Moleong,Lexy J.2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung,Remaja Rosdakarya.
- Moleong,Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung,Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono,2009 *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung,Alfabeta
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia